



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2026**

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PAINAN, November 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Organisasi	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah .

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sub Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tahun 2026 dimaksudkan untuk agar pegawai mengetahui peraturan perundang-undangan terbaru.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan pada Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2026 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi perundang-undangan.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Pengguna Anggaran/Pengguna Selatan
barang
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Kuasa Pengguna Anggaran Selatan
3. Pejabat Penatausahaan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas
Keuangan Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kegiatan Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 2 bulan (Maret s.d April 2026) dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Bulan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat Tulis Kantor												
2	Belanja Bahan Cetak												
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2026 sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor 3.27.01.2.05.0010 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

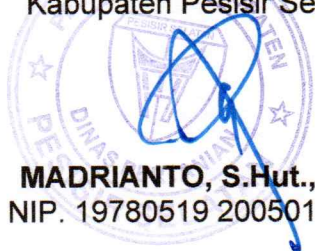
III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 6.000.000,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan (Maret s.d April 2026)
3. Keluaran / Output :
 - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - Lancarnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tupoksi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, November 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

Dibuat oleh :
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Pertanian Kab. Pessel



FITRI AYU, S.P., M.E.
NIP. 19870620 201502 2 002